



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIESTY KARTIKA**
2. Jabatan : **ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR**
3. NHK : **620658**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.935.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m²/730 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/54 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 1125 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 220 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 220 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
7. Tanah Seluas 110 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 220 m² di KAB / KOTA MOROWALI, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 208.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 8.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.035.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.161.535.000
III. HUTANG	Rp.	65.900.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.095.635.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.